

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAK SUBROGASI PADA ASURANSI
KENDARAAN**

[Studi pada PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung]



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

SAIDAH

NPM: 1421030212

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Pembimbing II : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H/ 2018

ABSTRAK

Berbicara mengenai asuransi pastinya masyarakat sudah tidak asing lagi. Asuransi merupakan lembaga keuangan yang menjadi salah satu alternatif dalam menghadapi risiko atas terjadinya suatu kerugian yang menimbulkan manusia baik itu harta maupun jiwa seseorang. Kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa secara kebetulan dan adanya unsur ketidak sengaja, tidak hanya diakibatkan dari pihak tertanggung saja melainkan pula dapat terjadi akibat pihak ketiga. Ketika kerugian yang dijamin dalam polis terjadi akibat adanya campur tangan dari pihak ketiga maka tertanggung akan mendapatkan ganti kerugian dari pihak asuransi tetapi tidak lagi menuntut kerugian kepada pihak ketiga karena hak tuntutan tersebut telah beralih kepada penanggung atau pihak asuransi.

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi pasal 284 KUHD tentang hak subrogasi pada asuransi kendaraan di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung?” dan “Bagaimana analisis hukum Islam tentang hak subrogasi pada asuransi kendaraan?”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 284 KUHD tentang hak subrogasi pada asuransi kendaraan yang terjadi di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung, dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam tentang hak subrogasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisa data yang ada, dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan bersifat deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan hak subrogasi dalam perjanjian asuransi kendaraan di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung belum berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tidak berjalan nya hak subrogasi di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung sebagai mana ketentuan Pasal 284 KUHD, karena disebabkan faktor Internal dan faktor Eksternal. Sedangkan menurut hukum Islam hak subrogasi dapat diterima/ tidak menyalahi. Karena prinsip subrogasi pada asuransi konvensional tidak dapat dipisahkan dengan prinsip demnitas, di mana tujuan keduanya menghindari pertaruhan dan perjudian yang dilakukan tertanggung dengan menagih dua kali yakni kepada pihak asuransi dan juga kepada pihak ketiga. Hal tersebut sama dengan prinsip menghindari *riba*, *maisir* (judi), dan larangan *gharar* (ketidak pastian) pada asuransi syariah (*Takaful*).



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Saidah
NPM : 1421030212
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAK
SUBROGASI PADA ASURANSI KENDARAAN (Studi
pada PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

NIP. 195802011986031002

Pembimbing II

Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001

Mengetahui

Ketua jurusan Muamalah

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAK SUBROGASI PADA ASURANSI KENDARAAN (Studi pada PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung)**. Disusun oleh Saidah, NPM 1421030212, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/ tanggal: Rabu 19 September 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Gandi Liyorba, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H.,M.H. (.....)

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. (.....)

DEKAN



Dr. Alamsyah, M. Ag.,
0721 7031002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ

الْغَنِيِّ ظُلْمٌ أَتُبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. berkata: Bahwasanya Nabi Saw bersabda: “Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihiwalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah”. (HR. Bukhari).¹

¹ Abu ‘Abdillah Muhammad, Shahih Bukhari, Dar Al-Fikr, Juz 7, (Bairut: 1992), h. 438.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Almarhum ayahanda, Abdul Latif dan Almarhumah Ibunda tercinta, Rubiah, yang telah memberikan pengorbanan besar dalam mendidik, membesarkan dan mendoakanku. Sungguh tak dapat terbalaskan keringat yang kalian cucurkan, doa yang kalian panjatkan dan kasih sayang yang kalian berikan untuk keberhasilanku semasa kalian masih hidup. Semoga karya ini dapat membayar sedikit dari kelelahan dan kebaikan itu;
2. Kakak-kakak dan keluargaku yang selalu mendukung, menghibur, serta mendoakan penulis dalam mencapai cita-cita dan keberhasilan;
3. Teman dan sahabat yang tidak dapat diucapkan satu per satu yang telah memberikan semangat serta motivasi sehingga terselesainya skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama SAIDAH dilahirkan di Tanjung Raya Bandar Lampung pada tanggal 07 Januari 1996 yang merupakan anak kesembilan dari sembilan bersaudara, putri bungsu dari Bapak Abdul Latif dan Ibu Rubiah. Jenjang pendidikan yang penulis tempuh yaitu:

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tamat pada tahun 2008 di SD Negeri 03 Tanjung Gading Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) tamat pada tahun 2011 di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 01 Pahoman Bandar Lampung.
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 01 tamat pada tahun 2014 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Kota Bandar Lampung.
4. UIN Raden Intan Lampung mengambil fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Hak Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan” (Studi di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. H. A. Khumedi Ja'far S.Ag., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Khoiruddin, M.S.I selaku sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan UIN Raden Intan Lampung;

3. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan atas petunjuk dan saran dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Hj. Linda Firdawaty, S. Ag., M.H., selaku Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga terselesainya skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu kepada penulis;
6. Pimpinan dan Pegawai Perpustakaan serta Staf Karyawan UIN Raden Intan Lampung atas diperkenankannya penulis meminjam buku-buku literatur yang dibutuhkan;
7. Pimpinan dan Staf Karyawan PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung yang telah memberikan izin penulis mengadakan penelitian, sehingga terselesaikannya skripsi ini;
8. Sahabat-sahabat tercintaku Narul Ita Sari, Lina Oktasari, Ria Anisya Fitri, Fandi Apriadi, Eka Agung Maylana, dan Hananto Adi Nugroho;
9. Sahabat-sahabatku Fitriyani Dewi, Ayu Afifah, Wulan Widya, Julia Nurma, dan Eni Susilowati;
10. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah angkatan 2014, khususnya Mu'amalah C;
11. Rekan-rekan KKN 238 Yetsi, Ifa, Fatimah, Eni, Ayu, Virgi, Nadia, Risa, Yeni, Kosma Ale, dan Aguts;

12. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keIslaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, Juli 2018

Penulis

Saidah

NPM. 1421030212

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II KONSEP ASURANSI DALAM ISLAM (TAKAFUL)	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi	12
B. Prinsip dan Jenis Asuransi	22
C. Rukun dan Syarat Perjanjian Pertanggungan	28
D. Berakhirnya Akad Perjanjian Pertanggungan	30
E. Karakteristik Asuransi.....	31
F. Pendapat Ulama Mengenai Asuransi	34
G. Hak Subrogasi dan Hukum Islam	37

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. (ACA) Cabang Lampung.....	44
B. Prinsip-Prinsip Asuransi.....	55
C. Praktik Hak Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung	62

BAB IV ANALISA DATA

A. Implementasi Pasal 284 KUHD Tentang Hak Subrogasi pada Asuransi Kendaraan di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung....	70
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Subrogasi pada Asuransi Kendaraan	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung di dalam judul proposal ini, maka akan ditegaskan makna beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini.

Adapun judul proposal ini adalah **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAK SUBROGASI PADA ASURANSI KENDARAAN (Studi pada PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung).**

1. Hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.¹
2. Hak Subrogasi adalah suatu pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.²
3. Asuransi Kendaraan adalah produk asuransi kerugian yang timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan.³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang hak subrogasi pada asuransi kendaraan di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung.

¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

²Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 281.

³Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/ PMK.010/ 2007, *tentang Penyelenggaraan Pertanggung Asuransi Pada lini Usaha Asuransi*, Pasal 1 ayat (2).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAK SUBROGASI PADA ASURANSI KENDARAAN (Studi pada PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung)** adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hak subrogasi dialihkan kepada penanggungoleh tertanggung atas pihak ketiga setelah tertanggung mendapatkan pembayaran klaim.
- b. Dalam praktiknya hak subrogasi menimbulkan masalah yang disebabkan pihak tertanggung tetap meminta ganti kerugian terhadap pihak ketiga walau sudah mendapatkan pembayaran klaim dari asuransi.
- c. Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Untuk mengkaji lebih dalam dan menganalisis pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang hak subrogasi menurut hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

- a. Permasalahan judul ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bahwa data dan referensi yang terkait dengan masalah judul dapat ditemukan di lapangan dan perpustakaan.

C. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan suatu sistem ganti kerugian yang bersifat finansial atau materil dengan cara mengadakan pengalihan risiko dari suatu pihak kepada pihak lain. Dasar hukum asuransi salah satunya diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengertian asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.⁴

Kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa secara kebetulan dan adanya unsur ketidaksengajaan, tidak hanya diakibatkan dari pihak tertanggung saja melainkan pula dapat terjadi akibat pihak ketiga. Tertanggung yang mengasuransikan barangnya kepada perusahaan asuransi, apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga, maka tertanggung akan mendapatkan ganti kerugian dari pihak asuransi dan pihak asuransi dapat menuntut ganti kerugian terhadap pihak ketiga. Adanya pengalihan hak untuk mengambil alih hak penggantian terhadap pihak ketiga yang dimiliki tertanggung dalam asuransi disebut hak subrogasi.⁵

Subrogasi diatur di dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.⁶ Penjelasanannya yaitu seorang penanggung yang telah membayar kerugian

⁴Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013), h. 77.

⁵Zainal Asikin, *Op. Cit*, h. 281.

⁶Subekti, dan Tjitrosudibio, *Op. Cit*, h. 84.

sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.⁷

Konsep dari subrogasi yaitu hak yang dimiliki penanggung dari tertanggung untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga. Jadi dengan adanya prinsip subrogasi, tertanggung hanya berhak atas ganti rugi, tetapi tidak lebih dari itu. Dan pihak penanggung berhak mengambil alih setiap keuntungan yang diperoleh tertanggung dari suatu kerugian yang dijamin polis, dan prinsip ini memperbolehkan pihak penanggung melakukan tuntutan kepada pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang dijamin polis dalam usaha penanggung untuk *meminimize* atau memperkecil kerugian yang terjadi, dengan catatan bahwa tuntutan itu dilakukan penanggung atas nama tertanggung. Jika tertanggung mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada penanggung, maka penanggung juga mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga selaku pihak yang menyebabkan kerugian terjadi.⁸

Namun dalam praktik keseharian penuntutan hak subrogasi banyak menimbulkan masalah. Masalah ini biasanya disebabkan karena pihak tertanggung selaku nasabah tetap saja meminta ganti kerugian pada pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim terhadap asuransi di mana hal ini akan menjadi sarana keuntungan bagi tertanggung dan banyak juga perusahaan asuransi yang tidak mengetahui hal

⁷Zainal Asikin, *Op. Cit*, h. 278.

⁸Rusman, "Prinsip Subrogasi", (On-line), tersediadi
www.akademiasuransi.org/2012/09/prinsip.subrogasi_18.html (18 September 2012)

ini serta tidak dapat menggunakan hak subrogasinya tersebut. Tertanggung yang menuntut kepada kedua belah pihak yakni kepada pihak ketiga selaku yang bersalah dan juga kepada pihak asuransi termasuk perbuatan melanggar hukum. Di satu sisi hal ini bertentangan dengan penggantian kerugian dalam syariat Islam yang mana jumlah ganti rugi tidak boleh kurang ataupun lebih dari jumlah kerugian yang diderita tertanggung.⁹

Berdasarkan keterangan di atas, maka menarik untuk dibahas berkenaan dengan hak subrogasi dari sisi Hukum Islam dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAK SUBROGASI PADA ASURANSI KENDARAAN (Studi pada PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung)”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi pasal 284 KUHD tentang Hak Subrogasi pada Asuransi Kendaraan di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung)?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam tentang Hak Subrogasi pada Asuransi Kendaraan?

⁹Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 19.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak subrogasi pada asuransi kendaraan yang terjadi di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak subrogasi pada asuransi kendaraan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melanggar aturan hukum hak subrogasi.
- 2) Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka ke-Islaman terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan hak subrogasi pada perusahaan asuransi.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan asuransi dalam hak subrogasi.
- 2) Sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala-gejala.¹⁰ Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam hal ini akan langsung mengamati orang-orang yang berhubungan dengan hak subrogasi.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan semua data yang diperoleh secara jelas dan terperinci, sekaligus menganalisa permasalahan yang ada untuk menjawab rumusan. Metode ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat.¹¹ Penelitian yang digagas ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang diteliti, dengan menggunakan ketentuan hukum Islam yang terfokus pada masalah hak subrogasi ditinjau dari hukum Islam di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung.

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Universitas Psikologi UGM, 1987), h. 10.

¹¹Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014), h.23.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individual maupun perorangan yakni Staf Asuransi dan Nasabah Asuransi. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang implementasi hak subrogasi perusahaan asuransi di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, al-Hadist, kitab-kitab fiqh, buku-buku, dan literature yang berhubungan dengan pokok permasalahan.¹²

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan.¹³ Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula, yakni kepada 2 Staf Asuransi dan 8 Nasabah Asuransi. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.

¹²Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 30.

¹³Susiadi AS, *Op. Cit*, h. 178.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung diujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen, catatan dalam kegiatan sosial dan dokumentasi lainnya.¹⁴ Dalam hal ini yang dimaksud dengan dokumentasi merupakan suatu metode pencarian dan alat pengumpulan yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya. Pada metode ini penulis mengupayakan untuk membaca literatur yang ada guna memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan.

5. Pengolahan data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Penandaan Data (*Coding*)

Coding adalah pengklasifikasian jawaban-jawaban dari pada responden ke dalam kategori-kategori. Biasanya pengklasifikasiannya dilakukan dengan cara memberikan kode/ tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban. Dalam hal ini penulis biasanya mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan jawaban dari pertanyaan tersebut akan dibuat kategori-kategori penilaian.¹⁵

¹⁴*Ibid*, h. 115.

¹⁵Susiadi AS, *Op. Cit*, h. 123.

b. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Sistematizing yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

c. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁶ Dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

6. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu hak subrogasi dalam perspektif hukum Islam yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif dan induktif. Metode kualitatif yaitu metode data yang terkumpul diuraikan dan dianalisa berdasarkan teori yang dipakai atau digunakan. Dalam uraian ini, penulis menggunakan pola pikir deduktif dan induktif.

¹⁶*Ibid*, h. 122.

- a. Pola pikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).¹⁷

Maksudnya yaitu suatu cara menganalisa data-data yang didapat dari perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Dari data-data tersebut ditarik generalisasi yang bersifat khusus yaitu fakta yang terjadi di lapangan.

- b. Pola pikir induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁸

Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi (benar terjadi). Dalam hal ini fakta tentang pelaksanaan dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nasabah melanggar hak subrogasi perusahaan asuransi pada PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung.

¹⁷Nana Sudjana, *Prosedur Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 6.

¹⁸Sutrisno Hadi, *Op. Cit*, h. 42.

BAB II

KONSEP ASURANSI DALAM ISLAM (*TAKAFUL*)

A. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi dalam konteks asuransi Islam, terdapat beberapa istilah antara lain: *takaful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab), dan *Islamic insurance* (bahasa Inggris) yang berarti “pertanggungan”. Pada dasarnya istilah-istilah tersebut tidaklah berbeda, karena masing-masing mengandung pengertian yang sama yaitu pertanggungan atau saling menanggung, namun dalam praktiknya yang sering dipakai adalah istilah *takaful*.¹

Menurut etimologi (bahasa Arab) istilah “*takaful*” berasal dari kata “*kafala-yakfulu-takaffula-yatacaffalu-takaffulu*”, yang artinya saling menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil ahli perkara seseorang.² Dalam ilmu thasrif dan sharaf, *takaful* ini termasuk dalam barisan *binaa a muta'adi*, yaitu *tafaa'ala* yang berarti “saling menanggung”. Sementara ada yang mengartikan dengan makna “saling menjamin”.³

¹Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi Cet. Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 136.

²Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah*, Cet. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.3

³Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Pers (Anggota IKAPI), (Jakarta: Cet. Pertama, 2000), h. 71.

Secara terminologi (istilah) terdapat beberapa definisi tentang *takaful* di antaranya adalah:

1. Menurut Muhammad Syakir Sula, mengartikan *takaful* dalam pengertian mu'amalah adalah “saling memikul resiko di antara sesama orang, sehingga satu sama lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya”.⁴
2. Menurut pandangan Abbas Salim, asuransi dipahami sebagai “suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti”.⁵
3. Menurut A. Djazuli, asuransi secara hukum Islam dikenal dengan istilah asuransi *takaful* yaitu “Asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari'at Islam dengan mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadist”.⁶

Sedangkan ahli fikih kontemporer Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *atta'min at-taawun* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-tamin at-taawun* atau asuransi tolong menolong adalah “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan”. *At-ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah “akad yang

⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 33.

⁵Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 1.

⁶A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 120.

mewajibkan seorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mengalami kecelakaan, ia diberi ganti rugi”.⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengertian asuransi dalam Pasal 1 angka (1) yaitu:⁹

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagaimana imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pemabayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

⁷Widyaningsih, Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 177.

⁸Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013), h. 77.

⁹Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 1 ayat (1).

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan asuransi syari'ah adalah pertanggungan berbentuk saling tolong-menolong di antara sesama anggota kelompok asuransi dalam menghadapi beberapa resiko atau musibah yang mungkin terjadi dan tidak diperkirakan sebelumnya sehingga satu sama lain dalam anggota kelompok yang tertanggung menjadi penanggung atas resiko anggota lainnya. Berbeda halnya dengan asuransi konvensional yang menggunakan sistem bunga sedangkan di asuransi syariah menggunakan sistem mudharabah dan musyarakah.¹⁰

2. Dasar Hukum Asuransi

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

¹⁰Djazuli, A dan Yadi, *Op. Cit*, h. 121.

1. Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2

اللَّهُ وَاتَّقُوا وَالْعَدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

﴿الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ﴾

Artinya :Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹¹

2. Al-Qur'an Surat at-Taghabun ayat 11

قَلْبُهُ يَهْدِيهِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ وَمَنْ اللَّهُ بِإِذْنٍ إِلَّا مُصِيبَةً مِنْ أَصَابَ مَا

﴿عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ﴾

Artinya: Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹²

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), h. 106.

¹²*Ibid*, h. 814.

3. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹³

4. Al-Qur'an Surat Luqman ayat 34

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁴

Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manusia hidup tidak akan mengetahui dengan pasti perjalanan hidupnya, tidak akan tahu apa yang besok akan dikerjakan dan apa yang akan dihasilkan serta apa yang akan terjadi pada dirinya, begitu juga ia tidak akan pernah tahu di mana dan kapan ia akan meninggal dunia.

¹³ Ibid, h. 44.

¹⁴ Ibid, h. 414.

Namun Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar senantiasa berusaha dan mempersiapkan diri untuk hari depan dalam menghadapi cobaan dan musibah yang mungkin akan terjadi. Di samping itu Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa, di mana hal tersebut merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam asuransi syari'ah (*takaful*).

b. Al-Hadist

Dasar hukum yang bersumber dari al-Hadist adalah:

1. Hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah r.a. tentang anjuran meringankan kesulitan seseorang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

(رواه ابن ماجه عن أبي هريرة)¹⁵

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. berkata:

Bahwasanya Nabi Saw bersabda: "Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, niscaya Allah SWT akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat". (HR. Ibnu Majah melalui Abu Hurairah r.a).¹⁶

Dalam hadist tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama dengan menghilangkan kesulitan seseorang

¹⁵Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), h. 903.

¹⁶Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Ahli Bahasa Oleh Zainuddin, Widjaya (Jakarta: 1992), h. 117.

atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah SWT akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya.¹⁷ Upaya ini merupakan tujuan dari asuransi syari'ah (*takaful*) yaitu berupaya untuk memberikan bantuan dan meringankan beban kesulitan sesama peserta asuransi semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha dari Allah SWT.

2. Hadist Tentang Aqilah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : افْتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ حُزَيْلٍ فَرَمَتْ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ
ص م , فَقَضَى أَنَّ دِيَّةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَّةَ الْمَرْأَةِ عِلْعَاقَتِهَا
(رواه البخاري)¹⁸

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzzail, kemudian salah satu wanita melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari).¹⁹

¹⁷ AMHasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 116.

¹⁸ Abu 'Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Dar Al-Fikr, Juz 7, (Bairut: 1992), h. 366-367.

¹⁹ Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 7, (Indonesia: Maktabah Dahlan, 2010), h. 22.

Hadist di atas menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *Aqilah* dalam hadist di atas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggungan bersama oleh *aqilah-nya* merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antar anggota suku.²⁰

3. Ijtihad

Permasalahan asuransi ini tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw, di samping itu juga para Imam Mazhab tidak ada yang memberikan penjelasan berkaitan dengan masalah asuransi. Oleh karena itu, permasalahan asuransi merupakan permasalahan ijtihad. Dengan merujuk pada:

a. Fatwa Sahabat

Prakik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Beliau berkata: “Orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan oleh salah seorang

²⁰AMHasan Ali, *Op. Cit*, h. 115.

masyarakat mereka”. Umarlah yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara professional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

b. Ijma’

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, terbukti dengan tidak adanya penentangan oleh sahabat lain. Dengan adanya *aqilah* berarti telah membangun suatu nilai kehidupan yang positif (*al-hasan*) di antara para suku Arab. Adanya aspek kebaikan dan nilai yang positif dalam praktik *aqilah* mendorong para ulama untuk bermufakat (*ijma’*) bahwa perbuatan semacam *aqilah* tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syariah Islam.²¹

c. Qiyas

Ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktek asuransi syari’ah (*takaful*) saat ini, dapat

²¹*Ibid*, h. 123.

diciyaskan dengan sistem *aqilah* yang telah diterima di masa Rasulullah.²²

d. Istihsan

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.²³ Dalam pandangan ahli ushul fiqh adalah memandang sesuatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.

Dari keempat sumber hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa meskipun asuransi dalam hukum Islam merupakan masalah yang baru dan belum ada secara jelas ketentuan yang mengatur, namun ayat al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas di atas memberikan gambaran bahwa asuransi syari'ah dibenarkan dalam hukum Islam, karena asuransi syari'ah berdasarkan pada asas *ta'awun* (tolong-menolong).

B. Prinsip dan Jenis Asuransi

1. Prinsip Asuransi

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islami secara komprehensif dan bersifat *major*. Hal ini disebabkan karena kajian

²²Widyaningsih, *Op. Cit*, h. 194-195.

²³*Ibid*, h. 242.

asuransi syari'ah merupakan turunan (*minor*) dari konsep ekonomika Islami. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sepuluh macam, yaitu: tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan *gharar*.²⁴

a. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.²⁵

b. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.²⁶ Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

c. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan

²⁴AM Hasan Ali, Op. Cit, h. 125.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid*, h. 126.

meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.²⁷

d. Kerja Sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama (*cooperation*) artinya di antara peserta asuransi yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang dideritanya.²⁸

Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (dalam hal ini nasabah asuransi) menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (*mudharib*) untuk dikelola. Sedang akad *musyarakah* dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua belah pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan.²⁹

e. Amanah (*trust worthy/ al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban), artinya peserta

²⁷*Ibid*, h. 127.

²⁸Ahmad Azhar Basyir, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam, dalam Ulumul Qur'an*, Nomor 2/ VII/ 1996, h. 15.

²⁹AM Hasan Ali, *Op. Cit*, h. 129.

asuransi memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian.³⁰

f. Kerelaan (*al-ridha*)

Prinsip kerelaan (*al-ridha*) dalam ekonomika Islami berdasar pada firman Allah SWT dalam QS.an-Nisa ayat 29

... عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

*Artinya : Kerelaan di antara kamu sekalian.*³¹

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.³²

g. Larangan riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Loc. Cit.*

³¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 108.

³² AMHasan Ali, *Op. Cit*, h. 131.

meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.³³

h. Larangan *maisir* (judi)

Syafi'I Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* judi artinya adalah salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.³⁴

i. Larangan *gharar* (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang gharar sebagai *al-khatar* dan *al-taghir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.³⁵

³³Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, Riba, *Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 5.

³⁴Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit*, h. 51.

³⁵AM Hasan Ali, *Op. Cit*. h. 134.

2. Jenis Asuransi

Di dalam operasionalisasinya, syarikat takaful (perusahaan takaful) melakukan kerja sama dengan peserta takaful (pemegang polis asuransi) atas dasar prinsip *al-mudharabah*. Syarikat takaful menyediakan dua jenis perlindungan takaful, yaitu:³⁶

1. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa), dan
2. Takaful Umum (Asuransi Umum).

Takaful keluarga adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian dan kecelakaan yang menimpa kepada peserta takaful.

Bentuk-bentuk takaful keluarga yang ditawarkan adalah:³⁷

1. Takaful Berencana
2. Takaful Pembiayaan
3. Takaful Pendidikan
4. Takaful Dana Haji
5. Takaful Berjangka
6. Takaful Kesehatan

Sedangkan Takaful Umum adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta takaful.

³⁶Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Cet ke I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 191.

³⁷*Ibid.*

Bentuk-bentuk Takaful Umum yang ditawarkan adalah:

1. Takaful Kebakaran
2. Takaful Kendaraan Bermotor
3. Takaful Pengangkutan
4. Takaful Rekayasa
5. Takaful Aneka

C. Rukun dan Syarat Perjanjian Pertanggungan

1. Rukun Perjanjian Pertanggungan

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk perjanjian akad ada empat, yaitu:³⁸

1. Pihak yang membuat akad (*al-'aqidam*) yaitu, orang yang membuat akad harus cakap bertindak atau mencapai usia 12 tahun.
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigotul 'aqad*) yaitu, harus adanya persetujuan ijab dan qobul dan kesatuan majelis akad. Hal ini harus dicapai tanpa adanya paksaan atau secara bebas.
3. Objek akad (*mahalul 'aqad*) yaitu, benda yang dijadikan akad dalam perjanjian dapat diserahkan dan dapat dilaksanakan, atau dapat ditransaksikan, artinya dapat diserahkan, tidak menimbulkan atau mengandung *gharar* dan bebas dari *riba*.

³⁸Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 96.

4. Tujuan akad (*maudhu 'al-aqad*) yaitu, tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, dan tidak ada pernyataan kehendak yang membuat akad, atau ada objek akad dan tujuannya.³⁹

2. Syarat Perjanjian Pertanggungan

Syarat-syarat terbentuknya akad, yaitu:⁴⁰

1. Tamyiz
2. Berbilang pihak (*at-ta'adud*)
3. Persetujuan ijab qabul (kesepakatan)
4. Kesatuan majelis akad
5. Objek akad dapat diserahkan
6. Objek tertentu dan dapat ditentukan
7. Objek akad dapat ditransaksikan
8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syariat Islam

Apabila pokok ini tidak dipenuhi maka tidak akan terbentuknya suatu akad. Apabila syarat dan rukun terbentuknya akad telah terpenuhi maka akad sudah terbentuk.⁴¹ Masing-masing syarat di atas yang membentuk akad memerlukan rukun agar syarat tersebut berfungsi

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid*, h. 97.

⁴¹*Ibid.*

membentuk akad, dalam hukum Islam memerlukan beberapa rukun perjanjian.

D. Berakhirnya Akad Perjanjian Pertanggungan

Ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:⁴²

1. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila:
 - a. Akad itu fasid maksudnya adalah akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.
 - b. Berlaku *khiyar syarat* (bergantung pada syarat) dan *khiyar 'aib* (rusak/cacat).
 - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad.
 - d. Telah tercapai akad itu secara sempurna.
4. Wafatnya salah satu pihak yang berakad. Walaupun salah satu pihak wafat maka dapat diteruskan oleh ahli waris dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perjanjian dapat berakhir apabila terjadi salah satu hal yang dapat membatalkan perjanjian. Hal-hal tersebut digunakan dalam perjanjian Asuransi Takaful Umum.

⁴²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 112.

E. Karakteristik Asuransi

Sebagai sebuah asuransi yang digali dari prinsip dan nilai Islam, asuransi syari'ah (takaful) memiliki karakteristik tertentu, karakteristik ini membedakan asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional. Adapun karakteristik atau ciri tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akad yang dilakukan adalah akad *al-takafuli*
- b. Selain tabungan peserta dibuat pula tabungan derma (*tabarru'*)
- c. Merealisir prinsip bagi hasil.⁴³

Lebih lanjut ketiga karakteristik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Karakteristik pertama, mengandung arti bahwa akad yang digunakan pada asuransi bukan akad *tabaduli* (saling mengerti atau saling menukar), sebagaimana dalam asuransi konvensional. Dalam akad *tabaduli* yang digunakan pada asuransi konvensional terjadi penukaran antara pembayaran klaim yang diserahkan perusahaan asuransi. Salah satu syarat sah akad *tabaduli* adalah adanya kejelasan berapa yang akan dibayarkan dan berapa yang akan diterima. Sedangkan penggunaan akad *tabaduli* dalam asuransi konvensional telah menyebabkan ketidakpastian tentang kumulasi pembayaran premi yang harus disetor peserta asuransi. Hal ini terjadi apabila peserta tertimpa musibah pada saat kontrak berlangsung. Waktu sejak akad dilakukan sampai tertimpa musibah tidak tentu, bisa panjang dan bisa pula pendek. Hal ini tentu saja menentukan

⁴³A. djazuli dan Yadi Janwari, *Op. Cit*, h. 22.

besarnya premi yang harus disetor oleh peserta. Dengan demikian salah satu syarat *tabaduli* yang tidak terealisasi dalam asuransi konvensional ini. Oleh karena itu akad *tabaduli* dalam asuransi konvensional ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian).⁴⁴

Berbeda dengan asuransi konvensional, dalam asuransi syari'ah yang digunakan adalah akad *takafuli* (saling menanggung atau saling menjamin). Akad *takafuli* ini dilakukan di antara sesama peserta asuransi, bukan antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana pada asuransi konvensional. Perusahaan asuransi dalam Islam hanya bertindak sebagai mediator terjadinya akad di antara sesama peserta asuransi. Dalam akad *takafuli* kejelasan berapa yang harus diberikan dan berapa yang diterima tidaklah menjadi syarat. Oleh karena itu asuransi Islam dalam hal akad (transaksi) terlepas dari unsur *gharar*.

Karakteristik kedua, yaitu adanya tabungan derma (*tabarru'*). Dalam asuransi syari'ah, khususnya dalam asuransi keluarga, sejak awal peserta asuransi sudah diberitahu bahwa tabungan (premi) yang disetor peserta akan dipilih menjadi dua yaitu, tabungan peserta dan tabungan derma (*tabarru'*). Tabungan peserta adalah tabungan yang diberikan kembali kepada peserta di saat masa kontrak telah habis atau tertimpa musibah atau mengundurkan diri. Sedangkan tabungan derma (*tabarru'*) adalah tabungan kebaikan yang diinfakkan peserta untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Tabungan *tabarru'* ini tidak akan

⁴⁴*Ibid*, h 23.

kembali kepada peserta apabila masa kontrak berakhir atau mengundurkan diri. Secara syar'i adanya tabungan *tabarru'* sesungguhnya merupakan realisasi prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dalam asuransi syari'ah.

Dari uraian di atas, jelas bahwa tabungan *tabarru'* yang merupakan ciri dari asuransi syari'ah tidak akan ditemukan dalam asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional tidak mengenal tabungan *tabarru'*, semua premi yang disetorkan oleh peserta pemegang polis disatukan dalam modal perusahaan asuransi. Pembayaran klaim yang diberikan oleh asuransi bukanlah diambil dari tabungan *tabarru'*, melainkan diambil dari uang yang dimiliki perusahaan asuransi.⁴⁵

Karakteristik ketiga yaitu, diterapkannya prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*). Prinsip ini dilakukan pada saat penyerahan premi yang berupa tabungan oleh peserta kepada perusahaan asuransi (akad *mudharabah*). Premi (tabungan) yang disetor oleh pihak perusahaan asuransi disatukan dalam kumpulan dana peserta yang kemudian diinvestasikan kepada investor dengan prinsip bagi hasil, yakni keuntungan dan ditanggung bersama (*profit and loss sharing*). Antara investor dengan perusahaan asuransi.

Keuntungan yang diperoleh asuransi takaful dari investasinya kemudian dibagi dengan peserta yang tertimpa musibah, mengundurkan diri, atau habis masa kontraknya. Ciri ini menandai bahwa asuransi takaful

⁴⁵*Ibid*, h. 24.

merupakan solusi dari prinsip bunga yang selama ini diterapkan dalam asuransi konvensional.⁴⁶

F. Pendapat Ulama mengenai Asuransi

Masalah asuransi dalam pandangan Islam termasuk dalam masalah Ijtihadiyah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan baik oleh al-Qur'an dan al-Hadist secara eksplisit. Para Imam Mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan para Imam Mujtahid lain yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi karena pada masanya asuransi belum dikenal.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang asuransi, baik asuransi jiwa maupun kerugian. Perbedaan pendapat ini dapat dimaklumi karena masalah asuransi termasuk bidang ijtihad. Masalah asuransi tidak disebutkan secara jelas dan prinsip dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pendapat para ahli hukum Islam ini berkisar pada kebolehan semua bentuk asuransi, ada juga yang memperbolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial, di samping itu ada yang sama sekali melarangnya dan menetapkan hukum asuransi adalah haram.⁴⁷

Di kalangan ulama/ cendekiawan muslim, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum asuransi itu sendiri, berikut alasan-alasan yang diungkapkan sebagai berikut:

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 252.

1. Mengharamkan asuransi

Menurut Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Yusuf Qardhawi, mengharamkan asuransi dengan beberapa alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pada hakikatnya asuransi sama dengan judi.
- b. Mengandung unsur yang tidak jelas dan tidak pasti.
- c. Asuransi mengandung riba/ rente.
- d. Ada unsur eksploitasi, karena apabila peserta tidak melanjutkan pembayaran premi, maka uang setoran akan hilang/ dipotong separuhnya.
- e. Iuran dana (premi) yang sudah dikumpulkan oleh peserta diputar oleh pihak pemegang polis dalam bentuk riba (dikreditkan atau dibungakan).
- f. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah SWT.⁴⁸

2. Membolehkan semua bentuk asuransi

Menurut Abdul Wahab Kallaf, Muhammad Yusuf Musa, mereka memperbolehkan semua bentuk asuransi dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tidak ada nash al-Qur'an dan as-Sunnah yang melarang asuransi.
- b. Adanya kerelaan, artinya antara kedua pihak yang berjanji untuk memikul tanggung jawab masing-masing.

⁴⁸*Ibid.*

- c. Dalam asuransi tidak ada pihak yang dirugikan, artinya kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan.
 - d. Ada kepentingan umum di dalamnya, artinya dana yang dikumpulkan dapat diinvestasikan (dijadikan modal) untuk pembangunan dan proyek-proyek yang bersifat produktif.
 - e. Dengan asuransi bisa menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta, benda, kekayaan dan kepribadian.⁴⁹
3. Memperbolehkan asuransi yang bersifat sosial semata dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial.

Ada dua pendapat yang memperbolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial yaitu:

- a. Menurut Abu Zahra (Guru Besar Hukum Islam Pada Universitas Cairo Mesir), alasannya adalah bahwa asuransi samahukumnya dengan akad mudharabah dan asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan.⁵⁰
- b. Menurut Muhammad Abu Zahrah dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam.⁵¹

⁴⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 309-312.

⁵⁰Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Cet ke II*, (Jakarta: Masagung, 1989), h. 165.

⁵¹Warkum Sumitro, *Op. Cit*, h. 167.

- c. Menganggap asuransi itu hukumnya subhat. Adapun alasan mereka yang menganggap *subhat* karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara *qoth'i* dan jelas mengharamkan ataupun menghalalkan asuransi ini.⁵²

G. Hak Subrogasi dan Hukum Islam

Dalam operasionalnya, di samping mematuhi syarat sah perjanjian, asuransi juga harus mematuhi prinsip-prinsip hukum asuransi, di antaranya adalah prinsip *insurable interest* (kepentingan), prinsip *indemnity* (keseimbangan), prinsip *utmost good faith* (kejujuran), prinsip *subrogasi*, dan prinsip *kontribusi*.⁵³

Dari salah satu prinsip di atas ada salah satu prinsip yaitu prinsip Subrogasi. Subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi:

Pasal 284: Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.⁵⁴

Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan/ kerugian itu. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti

⁵²Masfuk Zuhdi, *Op. Cit.*, h. 165.

⁵³Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2006, h. 200.

⁵⁴Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013), h. 84-85.

kerugian pada pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung.⁵⁵

Selain prinsip subrogasi ada salah satu prinsip di dalam prinsip asuransi yang melengkapi prinsip subrogasi, yaitu prinsip indemnitas. Prinsip indemnitas merupakan kontrak di mana penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung, dan tidak lebih besar daripada kerugian ini. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa pertanggungan bertujuan memberikan penggantian atas kerugian dan bahwa penggantian itu tidak boleh melebihi kerugian riil tertanggung.⁵⁶

Ada dua hal penting yang perlu dipahami dari prinsip indemnitas ini berkaitan dengan hukum Islam, *pertama*, bahwa adanya penggantian kerugian oleh penanggung kepada tertanggung tidak boleh menjadi diuntungkan, maka praktek itu akan membawa seseorang dengan motif judi atau taruhan. *Kedua*, batas tertinggi ganti rugi tersebut tidak melebihi kerugian riil tertanggung dalam asuransi kerugian.⁵⁷ Adanya pembayaran klaim yang lebih besar dari jumlah kerugian riil dapat dikatakan sebagai riba, jika definisi riba merujuk pada pendapat Razi. Menurutnya, riba

⁵⁵AMHasan Ali, *Op. Cit*, h. 81.

⁵⁶*Ibid*, h. 80.

⁵⁷Kuat Ismanto, “*Prinsip-Prinsip Hukum Asuransi Dalam Kajian Hukum Islam*”, dalam jurnal www.kuatismanto.com, (25 Februari 2017), h. 9.

sebagai pengambilan harta orang lain tanpa imbalan apapun.⁵⁸ Dari sini, nampak bahwa keberadaan prinsip indemnitas dalam asuransi sebagai penghalang adanya motif orang melakukan judi dalam berasuransi itu benar adanya. Sementara, judi itu sendiri adalah praktek yang dilarang oleh Islam.⁵⁹

Hal terpenting dalam prinsip indemnitas maupun kontrak nilai adalah adanya unsur kerelaan (*ar-ridla*) dan keadilan (*al-'adl*). Maksud unsur keadilan dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini berarti sebagai penempatan hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung. Pada posisi sebagai tertanggung wajib membayar premi, dan memiliki hak klaim apabila peristiwa kerugian terjadi. Sebaliknya, sebagai pihak penanggung berkewajiban mengelola dana secara amanah dan juga berkewajiban membayar klaim kepada tertanggung.⁶⁰

Sedangkan unsur kerelaan (*ar-rida*) dalam berasuransi adalah tertanggung seharusnya memiliki motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana sebagai premi untuk diberikan ke penanggung, dan juga memiliki niat membantu tertanggung lain yang terkena musibah.⁶¹

Sedangkan prinsip subrogasi adalah prinsip memberi hak pada penanggung yang telah membayarkan ganti rugi, yaitu segala hak

⁵⁸*Ibid*, h. 10.

⁵⁹*Ibid*, h. 9.

⁶⁰*Ibid*, h. 10.

⁶¹*Ibid*.

tertanggung terhadap pihak ketiga. Hal itu dilakukan berkenaan dengan terjadinya kerugian itu. Jika rumah seseorang terbakar karena kelalaian tetangga yang membakar sampah di pekarangannya, maka pemilik rumah itu tidak bisa menagih keduanya, yaitu perusahaan asuransi dan juga tetangga penyebab kebakaran itu. Perusahaan asuransi akan membayar kerugian tersebut, tetapi kemudian memperoleh hak tertanggung untuk menagih tetangga tersebut.⁶² Hak subrogasi ini menempatkan beban pada yang bertanggung jawab memikulnya dan mencegah tertanggung mendapatkan keuntungan dengan menagih dua kali untuk kerugian yang sama. Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka penanggung, setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.⁶³

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang subrogasi hanya dapat terjadi apabila penanggung telah memberikan penggantian kerugian kepada tertanggung. Di dalam Polis Standart Asuransi Kebakaran Indonesia juga disebutkan mengenai ketentuan subrogasi yang tercantum dalam Pasal 16.

⁶²*Ibid.*

⁶³Hasan Ali, *Loc. Cit.*

Pasal 16 :

- 1) Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini, penanggung menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi termasuk dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari tertanggung.
- 2) Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
- 3) Kelalaian tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dalam ayat 2 di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak penanggung untuk mendapatkan ganti rugi.⁶⁴

Adapun mekanisme aplikasi subrogasi, yaitu:⁶⁵

1. Pihak tertanggung harus memilih salah satu sumber penggantian kerugian, dari pihak ketiga atau dari perusahaan asuransi;
2. Jika pihak tertanggung sudah menerima penggantian kerugian dari pihak ketiga, ia tidak akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi, kecuali jika jumlah penggantian dari pihak ketiga tersebut tidak sepenuhnya; dan
3. Jika pihak tertanggung sudah mendapatkan penggantian dari asuransi, ia tidak boleh menuntut pihak ketiga akibat perbuatannya. Karena hak menuntut tersebut sudah dilimpahkan ke perusahaan asuransi.

Konsep subrogasi hanya dipergunakan dalam asuransi kerugian, di mana prinsip indemnitas dapat sepenuhnya diberlakukan. Pada asuransi kerugian dikenal *contract of indemnity* karena harta benda yang dipertanggungkan dapat dinilai

⁶⁴Polis Asuransi Kebakaran Indonesia Pasal 16 tentang Subrogasi

⁶⁵Rusman, "Prinsip Subrogasi", (On-line), tersediadi
www.akademiasuransi.org/2012/09/prinsip.subrogasi_18.html (18 September 2012)

dengan uang, sedangkan dalam asuransi jiwa adalah *non indemnity contract* karena tidak ada acuan mengenai berapa harga bagi jiwa atau nyawa seseorang.⁶⁶

Dalam uraian ini, prinsip subrogasi dibahas dalam kerangka tertanggung tidak boleh memperkaya diri secara tidak sah dalam mengikuti asuransi. Pengkayaan diri ini berupa menagih dua kali, baik kepada perusahaan maupun kepada pihak ketiga sebagai penyebab musnahnya obyek asuransi. Praktek semacam ini dalam asuransi bertentangan dengan prinsip subrogasi.⁶⁷

Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan/ kerugian itu. Namun, penagihan ganti rugi peserta kepada pihak ketiga dianggap tidak sah, sebab hak peserta untuk meminta ganti rugi telah berpindah kepada perusahaan asuransi. Dari sini, nampak bahwa dengan adanya prinsip subrogasi dalam asuransi tertanggung tidak bisa memperkaya diri dengan jalan yang tidak sah.

Abd al-Qadir ‘Audah mengatakan bahwa keadaan tersalah dalam suatu kejadian adalah seperti kejahatan disengaja, tetapi sebab tanggung jawab hukum (*legal liability*)nya berbeda, yaitu sebab tanggung jawab disengaja adalah kehendak dari diri sendiri untuk melakukan perbuatan mungkar, sedangkan sebab tanggung jawab orang yang tersalah-tidak sengaja- adalah karena kecerobohan dan tidak hati-hati.⁶⁸ Kemaslahatan umum menuntut adanya tanggung jawab atas kesalahan tidak disengaja, karena hal itu akan membuat orang lain berhati-hati

⁶⁶Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: SinarGrafika, 2008), h. 100.

⁶⁷Kuat Ismanto, *Op.Cit*, h. 11.

⁶⁸*Ibid.*

dalam memakai haknya. Termasuk dalam praktek subrogasi ini, di mana pihak ketiga sebagai penyebab terjadinya bahaya tetap dituntut membayar ganti rugi, yang mungkin atas kecerobohannya.

Apabila perbuatan bahaya atau tindakan merugikan orang lain itu berkaitan dengan kerusakan harta, maka untuk ganti ruginya tidak berlaku hukum *diyat*, tetapi harus dengan ganti harta pula. Meskipun, berdasar pada model pembayaran ganti rugi, praktek subrogasi tidak menyerupai dalam prinsip-prinsip pembayaran ganti rugi yang ada dalam Islam, maka tidak dapat dikatakan begitu saja bahwa itu bertentangan dengan hukum Islam. Karena, dalam asuransi itu lebih nampak sebagai hubungan keuangan, maka dalam prinsip subrogasi ini ganti rugi dibayar dengan menggunakan uang. Praktek ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, dan telah dipahami oleh para pihak. Oleh karenanya, itu dianggap sah menurut hukum Islam berdasar pada adat kebiasaan (*'urf*).⁶⁹

⁶⁹*Ibid.*

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung

1. Sejarah PT. Asuransi Central Asia di Indonesia

PT. Asuransi Central Asia (ACA) berdiri pada tanggal 29 Agustus 1956, dengan nama “Maskapai Asuransi Oriental” NV. Pada tanggal 5 Agustus 1958, nama perusahaan berubah menjadi PT. ASURANSI CENTRAL ASIA (ACA). Sejak berdirinya hingga saat ini, ACA telah memainkan peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia, khususnya dalam menyediakan produk-produk asuransi kerugian.

Perkembangan perusahaan hingga saat ini menunjukkan *trend* yang baik, walaupun situasi perekonomian dan beragam kejadian bencana alam sering terjadi di negeri ini. Saat ini perusahaan telah memiliki aset sebesar Rp. 4,537 triliun, 59 cabang kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, dan 1 (satu) unit syariah di Jakarta, serta jumlah karyawan sekitar 1300 orang. Per desember 2010, permodalan yang dimiliki ACA mencapai Rp. 3,289 triliun dan RBC (*Risk Based Capital*) sebesar 204,71%, sedangkan batas minimal sesuai ketentuan pemerintah adalah sebesar 120%.¹

ACA menyediakan beragam jenis produk asuransi antara lain asuransi properti, konstruksi, pengangkutan, rangka kapal, kendaraan bermotor dan aneka.

¹Company Profile, PT. Asuransi Central Asia (ACA), h. 30.

Selain itu beberapa produk unggulan disesuaikan dengan trend kebutuhan dan gaya hidup masyarakat telah diluncurkan antara lain ASRI, OTOMATE, Travel Safe, Medisafe, PA EXECUTIVE, PASMUDIK dan juga Asuransi Demam Berdarah (ADB). Khusus untuk asuransi kendaraan bermotor, ACA pada tahun 2010 telah menerima penghargaan “*Best Brand*” dan juga penghargaan di bidang pelayanan yaitu *Indonesia Customer Satisfaction Award* dari Konsultan Frontier dan Majalah Marketing. Terakhir, ACA telah menerima piala dan piagam penghargaan untuk CSR *award* berkaitan dengan partisipasi perusahaan dalam Corporate Social Responsibility melalui peluncuran produk Asuransi Mikro ADB (Asuransi Demam Berdarah) serta beragam kegiatan sosial perusahaan lainnya.²

Dengan komitmen yang tinggi berlandaskan visi dan misi yang ada, manajemen yakni bahwa eksistensi dan kemajuan perusahaan akan selalu tumbuh secara berkesinambungan.

Dengan semakin berkembangnya Asuransi di Indonesia, maka PT. Asuransi Central Asia (ACA) mendirikan cabang di beberapa daerah dan salah satunya di Bandar Lampung sejak tahun 2003, yang saat ini dipimpin oleh Bapak Iwan Setiawan sebagai Kepala Cabangnya.³

²*Ibid*, h. 31.

³Wawancara dengan Bapak Rio Firmansyah, Pada tanggal 09 April 2018.

2. Visi, Misi, dan Fokus PT. Asuransi Central Asia

1. Visi

Menjadi perusahaan asuransi profesional yang handal, mampu berkembang secara berkesinambungan, dan diakui baik di dalam negeri maupun oleh internasional.

2. Misi

- a. Menjadi perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang sehat
- b. Dikenal sebagai perusahaan yang bertanggung jawab
- c. Dikenal sebagai perusahaan yang memiliki lingkungan kerja yang baik sehingga mampu menghargai karyawannya dan membuat seluruh karyawan bagian dari perusahaan
- d. Dan yang terutama adalah agar dikenal sebagai perusahaan yang mampu memberikan pelayanan berkualitas tinggi pada nasabah.⁴

3. Fokus

- a. Upaya meningkatkan sinergi dan koordinasi internal, melalui pembenahan struktur organisasi front liner
- b. Pengembangan sektor asuransi pengangkutan dan rangka kapal, asuransi kredit, dan lain sebagainya

⁴Company Profile, Op. Cit, h. 33.

- c. Memperkuat sumber-sumber pendapatan premi yang sudah ada dan memasuki segmen pasar yang baru, serta mengembangkan produk-produk retail dan asuransi mikro
- d. Pengembangan jaringan distribusi melalui pengembangan agency, kerjasama dengan korporasi dengan jaringan nasabah besar.

3. Produk-Produk PT Asuransi Central Asia

PT Asuransi Central Asia (ACA) adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum dalam memberikan perlindungan finansial.⁵

Berikut ini merupakan jasa/ produk yang diproduksi oleh perusahaan untuk nasabah:

1. Asuransi Demam Berdarah (ADB)

ADB memberikan santunan kepada setiap nasabah yang terdiagnosa demam berdarah. Untuk memperoleh manfaat ini, nasabah cukup membeli asuransi dalam bentuk voucher yang harus diaktivasi terlebih dahulu.

2. Asuransi Rumah Idaman (ASRI)

ASRI merupakan paket perlindungan lengkap untuk bangunan rumah beserta isinya, mulai dari kebakaran, kerusakan/hura-hura, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Asuransi ini juga dapat diperluas dengan perlindungan terhadap banjir dan gempa bumi.

⁵*Ibid*, h. 50.

3. Asuransi Mobil Otomate (Otomate)

Otomate memberikan perlindungan terhadap kendaraan bermotor dari kerusakan akibat tabrakan, pencurian ataupun kecelakaan lalu lintas, kerusakan/ huru-hara, bencana alam, tanggung jawab hukum, santunan kematian bagi pengemudi dan penumpang dengan fasilitas tambahan berupa mobil pengganti, *road side assistance*, mobil derek dan mobil *claim*.

4. Asuransi Perjalanan *Travel Safe* (*Travel Safe*)

Travel Safe memberikan penggantian atas risiko selama melakukan perjalanan seperti kecelakaan diri, biaya media, evakuasi/ repatriasi, kehilangan/ keterlambatan bagasi, penundaan penerbangan, pembajakan, dll. *Travel Safe* resmi diakui oleh negara-negara *Schengen* sebagai dokumen resmi perjalanan untuk bisnis atau liburan.

5. *Personal Safe*

Personal Safe memberikan perlindungan terhadap kecelakaan selama 24 jam sehari, sepanjang tahun, di seluruh dunia. Pertanggungannya terdiri dari santunan biaya media, cacat tetap hingga meninggal dunia.

6. Medisafe

Medisafe adalah asuransi rawat inap bagi nasabah individual yang memberikan santunan secara reimbursement baik

karena sakit maupun kecelakaan. Pertanggungan meliputi santunan rawat inap, pembedahan dan biaya pengobatan.

7. Asuransi Kesehatan Kumpulan (Mediplus)

Mediplus adalah asuransi kesehatan kumpulan bagi karyawan perusahaan yang menjamin rawat inap maupun rawat jalan, biaya melahirkan, perawatan gigi dan kaca mata. Dilengkapi dengan fasilitas *swipe card* yang dapat digunakan di seluruh jaringan provider klinik dan rumah sakit di Indonesia.

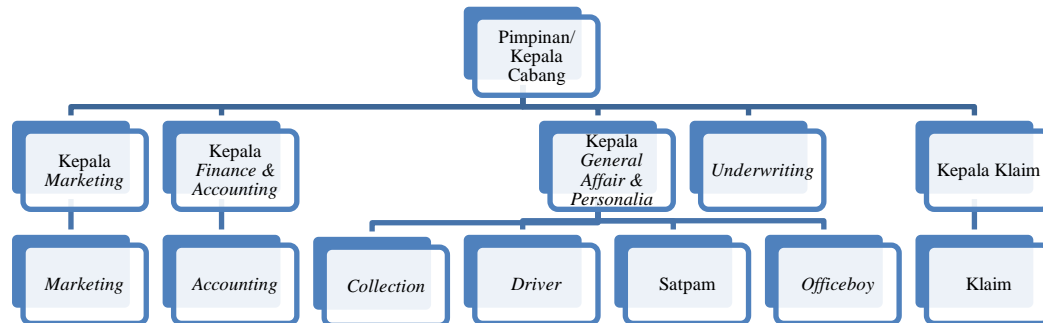
8. Polis Asuransi Mudik (Pasmudik)

Pasmudik adalah asuransi kecelakaan diri yang ditawarkan kepada para pemudik menjelang hari raya lebaran. Berlaku selama 14 hari dengan jaminan meliputi risiko kecelakaan dan biaya medis akibat kecelakaan.

9. Asuransi Pengangkutan (Asuransi Kargo)

Asuransi pengangkutan memberikan perlindungan bagi barang-barang dagangan, bahan baku, dan lain-lain yang akan dimuat melalui pengangkutan laut, darat maupun udara. Asuransi ini juga memberikan jaminan uang tambang (*freight*) serta keuntungan yang diharapkan (*imaginaire profit*).

4. Struktur Organisasi PT Asuransi Central Asia



Berikut Penjelasan tugas masing-masing karyawan berdasarkan struktur organisasi PT Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung:⁶

1. Kepala Cabang

Menandatangani surat-surat penting yang diajukan, melaporkan perkembangan kantor cabang kepada direktur di kantor pusat, memantau pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan.

2. Kepala *Marketing*

Memantau target pencarian nasabah, memantau perkembangan dan penambahan nasabah.

3. Kepala *Finance & Accounting*

Memantau laporan keuangan yang dibuat, memantau keluar masuk uang khas kantor.

⁶*Ibid*, h. 68.

4. Kepala *General Affair*& Personalia

Memeriksa absen, menerima dan mengurus pengunduran diri karyawan, pengurus fasilitas kantor, mengurus izin tidak masuk karyawan.

5. *Underwriting*

Memasukkan data nasabah dan mencetak polis, mendata asuransi-asuransi yang masuk dari nasabah, membuat laporan produksi mingguan dan bulanan.

6. Kepala Klaim

Mengurus nasabah prioritas, mengecek masuknya klaim, memeriksa klaim-klaim yang masuk dari nasabah.

7. *Marketing*

Mencari nasabah, *follow up* nasabah, mencari leasing, menerbitkan polis, produksi nasabah.

8. *Accounting*

Membuat laporan keuangan, memisahkan premi dan klaim, memeriksa pembayaran premi (mengolah data).

9. *Collection*

Mengantar polis, menagih premi, mengantar surat-surat penting.

10. Klaim

Menerima laporan klaim dari nasabah, survei klaim yang diajukan nasabah, menghitung besarnya klaim yang diajukan.

11. *Driver*

Supir kantor, mengantar keperluan-keperluan yang dibutuhkan staff sampai ke tujuan.

12. *Officeboy*

Menjaga dan membersihkan kator

13. Satpam

Menjaga keamanan kantor.

5. Jenis Asuransi Kendaraan

Ada 2 jenis asuransi untuk kendaraan dilihat dari jenis kendaraannya, yaitu asuransi motor dan asuransi mobil. Dan berdasarkan jenis perlindungannya, asuransi kendaraan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut:⁷

1) Asuransi *All Risk* atau *Comprehensive*

Asuransi *all risk* yaitu jenis kendaraan yang memberikan perlindungan dan penggantian biaya atau menjamin atas semua jenis risiko baik yang ringan maupun berat hingga risiko kehilangan kendaraan. Bahkan kerusakan sedikit saja pada kendaraan, pemilik kendaraan bisa mengajukan klaim dan

⁷Wawancara dengan Bapak Rio Firmansyah, Pada tanggal 09 April 2018.

perusahaan asuransi akan menanggung semua biaya perbaikan kendaraan tersebut.

Karena nilai pertanggungan meliputi semua jenis risiko, maka nilai premi yang harus dibayar untuk jenis asuransi *all risk* cukup mahal. Pertanggungan jenis asuransi ini dapat diperluas, seperti risiko karena huru-hara, atau penambahan aksesoris kendaraan. Perluasan pertanggungan tersebut tentu saja melalui penambahan biaya premi.

2) Asuransi *Total Loss Only* (TLO)

Asuransi TLO adalah jenis asuransi kendaraan yang memberikan jaminan atau biaya pertanggungan hanya jika kendaraan hilang akibat pencurian dan terjadi kerusakan kendaraan dengan nilai perbaikan sama atau lebih dari 75 % harga kendaraan pada saat itu. Jika taksiran nilai perbaikan atas kerusakan mobil kurang dari 75 % dari harga kendaraan, maka pengajuan klaim pasti akan ditolak oleh perusahaan asuransi.

Karena jenis pertanggungan yang tidak menyeluruh, maka nilai premi asuransi TLO lebih murah dari jenis asuransi yang lain.

3) Asuransi Kombinasi

Jenis asuransi ini merupakan kombinasi dari asuransi *all risk* dan TLO. Maksudnya, semua kerusakan kecil hingga berat atau parah serta kehilangan kendaraan bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi. Teknis pada jenis asuransi ini tergantung

pada pilihan pertanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi seperti: Pada tahun pertama, pertanggungan adalah jenis *all risk*. Lalu di tahun kedua, menggunakan TLO. Atau contoh kondisi lain berikut. Sebuah kendaraan diasuransikan menggunakan jenis asuransi *all risk* di dua atau tiga tahun pertama ketika kendaraan masih dalam kondisi baru. Kemudian di tahun-tahun berikutnya beralih ke jenis TLO mengingat usia kendaraan yang tidak muda lagi. Jadi jenis asuransi ini bisa menyesuaikan tergantung pada kondisi kendaraan dan kondisi keuangan pemilik kendaraan.

6. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan klaim asuransi kendaraan adalah sebagai berikut:

- 1) Melapor ke perusahaan asuransi khususnya bagian klaim asuransi
- 2) Menyerahkan bukti kejadian
- 3) Mengisi formulir selengkap-lengkapannya yang diberikan pihak asuransi dan ditandatangani oleh tertanggung
- 4) Menjelaskan secara terperinci urutan kejadian
- 5) Mempersiapkan beberapa dokumen kecelakaan, yang terdiri dari:
 - 1) Fotocopy klaim yang sudah diisi oleh si pemegang polis pada tahap ketiga tadi
 - 2) Fotocopy polis asuransi kendaraan yang dimiliki
 - 3) Fotocopy SIM

- 4) Fotocopy STNK
- 5) Surat keterangan dari pihak kepolisian
- 6) Mempersiapkan dokumen tanggung jawab dari pihak ketiga (apabila ada pihak ketiga).⁸

B. Prinsip-Prinsip Asuransi

1. Prinsip-prinsip Asuransi

Untuk mendukung karakteristik sifat khusus perjanjian asuransi dan untuk memelihara dan mempertahankan sistem perjanjian asuransi diperlukan adanya prinsip-prinsip yang mempunyai kekuatan mengikat atau memaksa.⁹ Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi di Indonesia antara lain adalah:

a. Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat peristiwa itu.

Kepentingan inilah yang membedakan asuransi dengan perjudian. Jika tertanggung tidak mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan itu, maka asuransi menjadi perjudian atau pertaruhan. Jadi, pada hakekatnya, setiap

⁸Wawancara, dengan Bapak Diki Zuhartono, Staf Klaim PT. Asuransi Central Asia, pada Tanggal 09 April 2018.

⁹Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2006, h. 200.

kepentingan itu dapat diasuransikan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat hak sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.¹⁰

b. Prinsip Indemnitas (*indemnity*)

Kebanyakan kontrak asuransi kerugian dan kontrak asuransi kesehatan merupakan kontrak indemnity atau “kontrak penggantian kerugian”. Penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung, dan tidak lebih besar daripada kerugian ini. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian.

Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka pihak penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuntungan setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita.¹¹

Menurut H. Gunanto, prinsip indemnitas tersirat dalam Pasal 246 KUHD yang memberi batasan perjanjian asuransi (yakni asuransi kerugian) sebagai perjanjian yang bermaksud memberi penggantian kerugian, kerusakan

¹⁰*Ibid*, h. 201.

¹¹AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.

atau kehilangan, (yaitu indemnitas) yang mungkin diderita tertanggung karena menyimpannya suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan. Digunakannya prinsip indemnitas di dalam asuransi didasarkan pada asas di dalam hukum perdata, yaitu larangan memperkaya diri secara melawan hukum atau memperkaya diri tanpa hak (*onrechtmatige verrijking*).¹²

c. Prinsip Kejujuran Sempurna (*utmost good faith*)

Utmost good faith adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (*material fact*) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jelas menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/ kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan.¹³

d. Prinsip Subrogasi (*subrogation*)

Subrogasi adalah suatu pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.¹⁴ Penanggung mempunyai hak subrogasi atas segala yang dapat diperoleh dari pihak ketiga yang menyebabkan

¹²Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, h. 204.

¹³Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 281.

¹⁴*Ibid.*

kerugian atau kerusakan atau pencurian atas kendaraan bermotor yang diasuransikan hingga jumlah ganti rugi yang dibayar oleh penanggung.¹⁵

Kerugian yang diderita seorang tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, dilihat dari segi timbulnya kerugian tersebut, ada dua kemungkinan bahwa tertanggung selain dapat menuntut kepada pihak ketiga yang karena kesalahannya menyebabkan terjadinya kerugian tersebut.¹⁶

Dalam keadaan demikian, maka tertanggung mempunyai kesempatan untuk menuntut ganti rugi dari dua sumber, yaitu dari pihak penanggung dan pihak ketiga. Penggantian dua kerugian dari dua sumber itu jelas bertentangan dengan asas indemnitas dan larangan untuk memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum. Sebaliknya apabila pihak ketiga juga dibebaskan begitu saja dari perbuatannya yang telah menyebabkan kerugian bagi tertanggung sangatlah tidak adil. Untuk menghindari hal demikian itu, pihak ketiga yang bersalah itu tetap dapat dituntut, hanya saja hak untuk menuntut itu dilimpahkan kepada pihak penanggung (subrogasi).¹⁷ Sehubungan dengan hal itu Pasal 284 KUHD menentukan:¹⁸

Pasal 284 :Penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu; dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

¹⁵Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 101.

¹⁶Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, h. 205.

¹⁷*Ibid*, h. 206.

¹⁸Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013), h. 84-85.

Subrogasi menurut undang-undang hanya dapat berlaku apabila terdapat dua faktor, yaitu:

1. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung juga mempunyai hak terhadap pihak ketiga; dan
2. Hak-hak itu adalah karena timbulnya kerugian akibat perbuatan pihak ketiga.

e. Prinsip Kontribusi (*contribution*)

Tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.¹⁹

2. Besarnya Hak Subrogasi

Prinsip subrogasi berfungsi untuk mendukung agar prinsip indemnitas tidak dilanggar, maka seorang penanggung tidak akan menikmati recovery lebih besar dari pada nilai kerugian yang telah

¹⁹AMHasan Ali, *Op. Cit*, h. 82.

dibayarkan atau diselesaikan oleh pihak penanggung kepada tertanggung, sehubungan dengan kerugian tersebut.²⁰

Sebagai contoh: Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari penanggung sebesar Rp. 100.000.000,-; melalui penanggung berhasil mendapatkan recovery atau penggantian dari pihak ketiga sebesar Rp. 120.000.000,-. Maka hak subrogasi hanya membenarkan: Penanggung untuk menerima recovery sebesar Rp. 100.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- menjadi hak tertanggung.

3. Timbulnya Hak Subrogasi

Terdapat empat keadaan atau sumber-sumber di mana seorang penanggung memperoleh Hak Subrogasi, di antaranya yaitu:²¹

a. *Tort* (Perbuatan Melanggar Hukum)

Tort adalah perbuatan yang melanggar Hukum Kepatuhan. Adalah kesalahan yang sifatnya perdata dan bukan merupakan tindakan kriminal. Apabila pokok pertanggungan mengalami kerugian/ kerusakan yang dijamin dalam polis dan disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian pihak ketiga (sesuai dengan pasal 1365 & 1369 KUHPerdata), maka pihak ketiga yang menimbulkan kerugian atau kerusakan tersebut wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian atau kerusakan yang terjadi.

²⁰Rusman, "Prinsip Subrogasi", (On-line), tersediadi www.akademiasuransi.org/2012/09/prinsip.subrogasi_18.html (18 September 2012)

²¹*Ibid.*

Setelah penanggung membayar ganti rugi atas kerugian/ kerusakan yang diderita oleh tertanggung, maka penanggung memperoleh hak subrogasi dari pihak tertanggung untuk menuntut pihak ketiga tersebut yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan atas kepentingan tertanggung tersebut.

b. *Contract* (Perjanjian atau Kontrak)

Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian tersebut, lazimnya disebutkan di dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Sehingga apabila salah satu pihak karena kelalaiannya menjalankan kontrak atau perjanjian tersebut, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka ia (pihak yang bersalah) wajib mengganti kerugian tersebut.

c. *Law* (Undang-Undang)

Di Inggris, apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan, maka Pemerintah daerah setempat yang akan bertanggung jawab, dalam hal ini adalah pihak kepolisian.²² Apabila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung, maka penanggung dapat meminta ganti rugi atau penggantian kembali kepada pihak kepolisian (Hak Subrogasi).

²²*Ibid.*

d. *Subject Matter Of Insurance* (Pokok Pertanggungan)

Dalam hal terjadi klaim yang dianggap sebagai klaim *Total Loss* (kerugian total), maka tertanggung akan menerima ganti rugi penuh. Apabila terdapat *salvage* (sisir barang), maka *salvage* tersebut akan menjadi milik penanggung setelah klaim atas kerugian tersebut diselesaikan atau dibayar. *Salvage* tersebut mempunyai nilai ekonomis bila dijual dan merupakan salah satu dari Hak Subrogasi.

C. Praktik Hak Subrogasi pada Asuransi Kendaraan di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung

1. Pelaksanaan Hak Subrogasi

Hak Subrogasi adalah legitimasi bagi perusahaan asuransi berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang seperti yang telah disebutkan dalam salah satu prinsip asuransi dan juga polis asuransi.

Menurut KUHD Pasal 284, bila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung akan segala hak yang diperoleh dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab atas perbuatan yang dapat menghilangkan setiap hak penanggung atas pihak ketiga tersebut.

Dalam praktik diketahui bahwa dalam pelaksanaannya di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung ini subrogasi menghadapi berbagai hambatan. Ditegaskan oleh Bapak Diki Zuhartono selaku staff bagian

klaim nasabah PT. Asuransi Central Asia mengatakan bahwa kebanyakan nasabah yang melapor adalah nasabah yang tidak mencantumkan keterangan bahwa kerugian tersebut terjadi akibat pihak ketiga. Hal ini lebih disebabkan karena penanggung tidak mendapat laporan bahwa kejadian yang sebenarnya di lapangan. Pihak tertanggung hanya melaporkan tentang kejadian yang menyebabkan kerugian dan pihak ketiga yang menyebabkan kerugian sangat jarang dilaporkan sedangkan bila dilihat dari prosedur pengajuan klaim apabila ingin mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi tersebut harus mencantumkan surat atau dokumen keterangan dari pihak ketiga bila ada.²³

Di lain sisi pihak asuransi tidak mensurvei ke lapangan dan mengkoordinir kepada pihak kepolisian hanya saja langsung menerima data tanpa mensurveinya kembali sehingga pihak penanggung atau pihak asuransi tidak mengetahui apakah ada atau tidaknya hak subrogasi dalam kejadian pengajuan klaim tersebut. Oleh karena itu pihak penanggung dalam membayar ganti kerugian terhadap objek pertanggungan dilakukan atas dasar ganti kerugian yang disepakati sehingga pihak asuransi tidak dapat mengajukan tuntutan hak subrogasinya tersebut.

Bapak Diki melanjutkan dalam proses pelaksanaan subrogasi tidak serta merta semua nasabah tidak mencantumkan adanya pihak ketiga di dalam mengajukan klaim asuransi kendaraan. Ada pula tertanggung yang

²³Wawancara, dengan Bapak Diki Zuhartono, Staf Klaim PT. Asuransi Central Asia, pada Tanggal 23 April 2018.

mengajukan klaimnya tersebut kepada pihak asuransi dengan berkenaan kerugian yang dideritanya karna pihak lain/ pihak ketiga.

Akan tetapi, meskipun pihak tertanggung mengajukan surat subrogasi namun nyatanya hak subrogasi tersebut tidak berjalan sepenuhnya. Kebanyakan para pelaku yang menabrak atau yang menimbulkan kerugian terhadap tertanggung adalah orang yang tidak sepenuhnya mau bertanggung jawab dan rata-rata adalah orang yang kurang mampu (ekonomi lemah), itu pula sebabnya yang membuat tertanggung lebih memilih untuk dibayar ganti rugi oleh perusahaan asuransi. Menurut Bapak Diki Zuhartono selaku Karyawan Staff Klaim Asuransi mengatakan bahwa jika pihak pelaku (pihak ketiga) termasuk kategori orang yang kurang mampu yang bisa dibilang kalau mereka juga agak sulit untuk membiayai kehidupan mereka, jadi apabila mereka dipaksa untuk mengganti kerugian maka beban hidup mereka semakin bertambah, dan ini sangatlah membuat pihak asuransi tidak ingin memperlakukan tindakan ini karena tidak akan menyelesaikan masalah sehingga penanggung memberikan kelonggaran kepada pihak ketiga untuk melakukan subrogasi atau pembayaran ganti rugi secara mencicil atau sampai kepada membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya.²⁴

Pada hakikatnya dalam sebuah bentuk perjanjian baik itu perjanjian asuransi, para pihak haruslah senantiasa menjunjung tinggi itikad baik

²⁴Wawancara, dengan Bapak Diki Zuhartono, Staf Klaim PT. Asuransi Central Asia, pada Tanggal 23 April 2018.

dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hak subrogasi, ternyata proses penyelesaiannya tak begitu mudah bagi pihak asuransi dalam mengaplikasikan hak tersebut. Maka upaya tanggung jawab sebagai pihak asuransi akan tetap mengcover atau mengganti kerugian yang dialami oleh tertanggung.²⁵

2. Faktor Penghambat Hak Subrogasi

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak subrogasi adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- a) Kurangnya sosialisasi tentang prinsip dasar asuransi dan hak subrogasi kepada nasabah;
- b) Kurang adanya kemauan dari pihak asuransi untuk melakukan survey kembali di lapangan serta kurangnya kemauan untuk bekerja sama dengan pihak berwajib (pihak kepolisian).

b. Faktor Eksternal

- a) Ada kalanya pihak ketiga (yang menyebabkan kerugian) tidak memiliki kemampuan ekonomi, sehingga pihak asuransi tidak mungkin menuntut tanggung jawab akibat perbuatannya tersebut;

²⁵Wawancara, dengan Bapak Diki Zuhartono, Staf Klaim PT. Asuransi Central Asia, pada Tanggal 23 April 2018.

- b) Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak subrogasi dari pihak tertanggung;
- c) Adanya itikad tidak baik dari tertanggung di mana tertanggung tidak mengajukan klaim yang sebenarnya atas kerugian yang diderita sebagai akibat pihak ketiga, sehingga pihak asuransi tidak mengetahui dan tidak dapat melaksanakan hak subrogasinya tersebut.

Dan berikut hasil wawancara antara penulis dengan nasabah yang mengajukan klaim asuransi kendaraan di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Riyanto selaku nasabah perusahaan asuransi mengatakan bahwa ia pernah dan setuju jika harus meminta ganti kerugian kepada pihak yang bersalah yaitu pihak ketiga dan juga mengajukan klaim ke perusahaan asuransi, menurut beliau sudah sewajarnya saja bila orang yang salah itu harus bertanggung jawab untuk setiap perbuatannya, walaupun di satu sisi meminta ganti kerugian kepada asuransi bukankah hal itu pun pantas dikarenakan setiap bulannya beliau membayar premi di perusahaan asuransi yang mana kendaraannya tersebut diasuransikan.²⁶

Menurut Ibu Heni selaku nasabah perusahaan asuransi mengatakan hal yang sama dengan Bapak Riyanto, bahwa beliau pernah melanggar hak subrogasi. Baginya hal tersebut sudah sepatutnya dimintakan ganti rugi,

²⁶Wawancara dengan Bapak Riyanto, Nasabah di PT. Asuransi Central Asia, tanggal 04 Juni 2018.

dan pihak asuransi tidak ada campur tangan dalam urusan nasabah dengan pihak ketiga karena pihak asuransi hanya mempunyai sebatas perjanjian dengan si nasabah saja tapi tidak dengan pihak ketiga.²⁷

Menurut Bapak Aji selaku nasabah perusahaan asuransi mengatakan bahwa tidak pernah melanggar hak subrogasi karena beliau tidak setuju jika harus meminta ganti kerugian kepada pihak yang bersalah yaitu pihak ketiga juga mengajukan klaim ke perusahaan asuransi, beliau beranggapan sebaiknya ganti rugi diselesaikan hanya dengan pihak yang menabrak atau bersalah karena hal itu lebih mudah dan tidak panjang urusannya.²⁸

Menurut Bapak Masri selaku nasabah perusahaan asuransi mengatakan bahwa tidak pernah melanggar hak subrogasi dan tidak setuju jika harus meminta ganti kerugian kepada pihak yang bersalah yaitu pihak ketiga juga mengajukan klaim ke perusahaan asuransi, menurut beliau sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak asuransi, dikarenakan kebanyakan sekarang pihak ketiga tidak bertanggung jawab dan takut lalai dalam mengganti kerugian yang diperbuatnya. Jadi untuk lebih amannya lebih baik ke perusahaan asuransi saja.²⁹

²⁷Wawancara dengan Ibu Heni, Nasabah di PT. Asuransi Central Asia, tanggal 17 Mei 2018.

²⁸Wawancara dengan Bapak Aji, Nasabah di PT. Asuransi Central Asia, tanggal 08 Mei 2018.

²⁹Wawancara dengan Bapak Masri, Nasabah di PT. Asuransi Central Asia, tanggal 14 Mei 2018.

Menurut Ibu Maisaroh selaku nasabah perusahaan asuransi mengatakan bahwa tidak pernah melanggar hak subrogasi dan tidak setuju jika harus meminta ganti kerugian kepada pihak yang bersalah yaitu pihak ketiga juga mengajukan klaim ke perusahaan asuransi, karena sebaiknya ganti rugi kepada asuransinya saja langsung agar lebih bermanfaat pembayaran preminya tersebut.³⁰

Menurut Bapak Galib selaku nasabah perusahaan asuransi mengatakan bahwa tidak pernah melanggar hak subrogasi dan tidak setuju jika harus meminta ganti kerugian kepada pihak yang bersalah yaitu pihak ketiga juga mengajukan klaim ke perusahaan asuransi, menurutnya hal tersebut terlalu ribet dan lama. Lebih baik untuk menyelesaikannya secara damai dengan pihak ketiga karena tidak semua ganti rugi itu besar jumlahnya bisa saja sedikit.³¹

Menurut Bapak H. Firman selaku nasabah perusahaan asuransi mengatakan bahwa tidak pernah melanggar hak subrogasi dan tidak setuju jika harus meminta ganti kerugian kepada pihak yang bersalah yaitu pihak ketiga juga mengajukan klaim ke perusahaan asuransi, karena menurutnya untuk lebih terjaminnya penggantian kerugian terhadap kendaraan yang rusak sebaiknya mengajukan klaim saja ke perusahaan asuransi.³²

³⁰Wawancara dengan Ibu Maisaroh, Nasabah di PT. Asuransi Central Asia, tanggal 17 Mei 2018.

³¹Wawancara dengan Bapak Galib, nasabah di PT. Asuransi Central Asia, tanggal 23 Mei 2018.

³²Wawancara dengan Bapak H. Firman, nasabah di PT. Asuransi Central Asia, tanggal 28 Mei 2018.

Menurut Bapak Mulyadi selaku nasabah perusahaan asuransi mengatakan hal yang sama dengan Bapak H. Firman bahwa beliau tidak pernah melanggar hak subrogas, menurut beliau sebaiknya mengajukan klaim saja ke perusahaan asuransi, dikarenakan pihak ketiga sekarang tidak semuanya mampu dan mau untuk bertanggung jawab sedangkan pihak asuransi sudah kewajibannya untuk membayar ganti rugi tersebut.³³

³³Wawancara dengan Bapak Mulyadi, nasabah di PT. Asuransi Central Asia, tanggal 30 Mei 2018.

BAB IV

ANALISA DATA

A. Implementasi Pasal 284 KUHD Tentang Hak Subrogasi pada Asuransi Kendaraan di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil dari wawancara dan dokumentasi, beserta data kepustakaan baik data yang diperoleh langsung dari kitab-kitab aslinya atau kitab terjemahannya, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu “Analisis Hukum Islam Tentang Hak Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan” (Studi pada PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung), maka sebagai langkah selanjutnya akan dianalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab dalam penelitian ini.

Telah diketahui bahwa teks-teks al-Qur'an, Sunnah dan pendapat-pendapat terdahulu yang telah terkodifikasi sifatnya terbatas, sementara itu permasalahan-permasalahan serta berbagai peristiwa hukum terus bermunculan dalam jumlah yang tak terbatas. Selain itu, kandungan nash yang begitu luas terkadang menimbulkan pemahaman yang berbeda serta kesadaran pada kita untuk memenuhi hal ini.

Permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks biasanya terjadi pada ruang lingkup muamalah, karena dalam lingkup ini manusia diberi kebebasan untuk bertindak selagi tidak berseberangan dengan syara'.

Salah satu ketentuan dalam perjanjian asuransi adalah Pasal 284

KUHD yang menentukan bahwa:

Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

Ketentuan tersebut menjelaskan tentang prinsip subrogasi yang merupakan suatu asas yang konsekuensinya logis dari prinsip indemnitas (keseimbangan) dalam perjanjian asuransi. Prinsip subrogasi ini merupakan salah satu prinsip dasar dari perjanjian asuransi, di mana seorang penanggung dalam hal ini yaitu perusahaan asuransi yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga, tertanggung itu bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap pihak ketiga itu. Dengan kata lain, penanggung dalam perjanjian asuransi juga berhak atas ganti rugi yang diterima tertanggung dari pihak ketiga yang menerbitkan kerugian atas objek yang pertanggungan dalam suatu perjanjian asuransi.

Sedangkan berdasarkan penelitian yaitu wawancara yang telah dilakukan di bab III, melihat hasil wawancara dari para nasabah dan ketentuan hak subrogasi sebagaimana yang diterapkan oleh PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung ini tidak sepenuhnya terlaksana, sebagaimana telah dilakukan penelitian bahwa dari 8 nasabah 2 di antaranya melakukan penagihan dua kali yaitu kepada pihak asuransi dan juga pihak ketiga sehingga

masih ada yang melakukan pelanggaran hak subrogasi, serta penanggung dalam membayar ganti kerugian terhadap objek pertanggungan dilakukan atas dasar ganti kerugian yang disepakati. Sedangkan mengenai adanya keuntungan lain yang diperoleh tertanggung dari pembayaran pihak ketiga penanggung tidak mengajukan tuntutan.

Selain itu, dalam praktik diketahui pula bahwa dalam pelaksanaannya subrogasi menghadapi berbagai hambatan, yaitu pertama ketidaktahuan pihak asuransi terhadap kejadian yang sebenarnya dikarenakan pihak tertanggung tidak mencantumkan surat keterangan adanya pihak ketiga di saat mengajukan klaim dan pihak asuransi tidak mensurvei ke lapangan dan mengkordinir kepada pihak kepolisian kembali sehingga pihak penanggung tidak mengetahui apakah ada atau tidaknya hak subrogasi dalam kejadian pengajuan klaim tersebut, dan yang kedua yaitu ketika tertanggung mengajukan klaim dengan mencantumkan surat keterangan dari pihak ketiga akan tetapi hak subrogasi tidak berjalan sesuai karena kurang inginnya tanggung jawab pihak ketiga dan ketidakmampuan pihak ketiga memenuhi kewajiban pada tertanggung, sehingga penanggung membayar sisa keseluruhan ganti rugi bahkan membebaskannya dari biaya-biaya yang dikeluarkan yang harus dibayar.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa mengapa ketentuan Pasal 284 KUHD dengan pelaksanaan prinsip subrogasi yang terjadi di lapangan yaitu tempat penelitian di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung tidak sesuai yakni dikarenakan dalam perjanjian asuransi

kendaraan tersebut menemui berbagai hambatan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan subrogasi dalam perjanjian asuransi kendaraan antara lain:

1. Faktor Internal (dari perusahaan asuransi selaku pihak penanggung)
 - a. Kurangnya sosialisasi tentang prinsip dasar asuransi dan hak subrogasi kepada nasabah;
 - b. Kurang adanya kemauan dari pihak asuransi untuk melakukan survey kembali di lapangan serta kurangnya kemauan untuk bekerja sama dengan pihak berwajib (pihak polisi).

Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan kerugian bagi perusahaan asuransi yang diakibatkan oleh faktor internal yang berasal dari perusahaan itu sendiri, seperti kurang aktifnya melakukan survey di lapangan untuk membuktikan laporan dari pihak tertanggung apakah *evenement* yang diperjanjikan dalam polis itu disebabkan oleh kesalahan sendiri ataukah ada subrogasi dari pihak ketiga, karena apabila tidak sesuai dengan polis dan disebabkan oleh kesalahan sendiri atau telah ada subrogasi maka pihak penanggung berhak untuk tidak memberikan ganti rugi atau memperoleh hak subrogasinya tersebut.

2. Faktor Eksternal (dari pihak tertanggung dan pihak ketiga)
 - a. Ada kalanya pihak ketiga (yang menyebabkan kerugian) tidak memiliki kemampuan ekonomi, sehingga pihak asuransi tidak mungkin menuntut tanggung jawab akibat perbuatannya tersebut;

- b. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak subrogasi dari pihak tertanggung;
- c. Adanya itikad tidak baik dari tertanggung di mana tertanggung tidak mengajukan klaim yang sebenarnya atas kerugian yang diderita sebagai akibat pihak ketiga, sehingga pihak asuransi tidak mengetahui dan tidak dapat melaksanakan hak subrogasinya tersebut.

Namun demikian dalam praktik untuk mengatasi hambatan pelaksanaan subrogasi atau ganti rugi atas klaim yang telah dibayarkan, perusahaan asuransi menempuh cara bersikap kooperatif dengan pihak ketiga, di mana melihat itikad baik dari pihak ketiga sehingga memberikan kelonggaran kepada pihak ketiga untuk melakukan subrogasi atau pembayaran ganti rugi secara mencicil dan membebaskannya dari biaya-biaya yang harus dibayar.

B. Pandangan Hukum Islam tentang Hak Subrogasi pada Asuransi Kendaraan

Kehadiran asuransi dalam perekonomian modern sekarang ini amat diperlukan dalam rangka meringankan resiko kerugian. Namun karena dalam praktiknya masih ada hal-hal yang dipandang menyalahi aturan syara' atau termasuk subhat, maka di antara para fuqaha mengharapkan dipertahankan asuransi itu tetapi harus disesuaikan dengan aturan Islam.

Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, prinsip asuransi syariah atau *Takaful* ada sepuluh macam, yaitu : tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, larangan *riba*, larangan *maisir* serta

larangan *gharar* (ketidakpastian). Sedangkan prinsip asuransi umum adalah: prinsip kepentingan, prinsip indemnitas, prinsip kejujuran, prinsip subrogasi dan prinsip kontribusi (kerja sama).

Menurut Pasal 284 KUHD prinsip subrogasi dibahas dalam kerangka tertanggung mengalihkan hak pada penanggung yang telah membayarkan ganti rugi kepada pihak tertanggung, dan segala hak tertanggung terhadap pihak ketiga akan beralih kepada pihak asuransi.

Subrogasi adalah pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada pihak asuransi setelah klaim dibayarkan. Kerugian yang diderita seorang tertanggung akibat suatu peristiwa tidak hanya terjadi akibat dari pihak tertanggung saja, melainkan juga dapat terjadi akibat dari pihak ketiga. Jika kerugian yang diderita seorang tertanggung terjadi akibat maka tertanggung tidak hanya mendapatkan ganti rugi dari pihak asuransi saja melainkan dapat menuntut ganti rugi juga kepada pihak ketiga. Dalam keadaan demikian, maka tertanggung mempunyai kesempatan untuk menuntut ganti rugi dari dua sumber, yaitu dari pihak penanggung dan juga pihak ketiga. Dalam prinsip subrogasi tertanggung tidak boleh memperkaya diri secara tidak sah dalam mengikuti asuransi. Pengkayaan diri ini berupa menagih dua kali, baik kepada perusahaan asuransi maupun kepada pihak ketiga sebagai penyebab musnahnya obyek asuransi. Penggantian dua kerugian dari dua sumber tersebut jelas bertentangan dengan prinsip subrogasi.

Prinsip asuransi umum salah satunya terdapat prinsip indemnitas yang merupakan pelengkap dari prinsip subrogasi. Keduanya saling berhubungan karena prinsip indemnitas memiliki tujuan yang sama dengan prinsip subrogasi, yakni tujuan tersebut adalah untuk mencegah tertanggung melakukan pengkayaan diri tanpa hak atau dengan cara yang tidak benar. Hal semacam itu dalam hukum Islam dapat disebut dengan melakukan praktik pertaruhan dan perjudian yang ditimbulkan pihak tertanggung, karena mengambil keuntungan ganda dengan mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi dan juga kepada pihak ketiga tanpa memberikan pengajuan yang sebenarnya. Adanya pengajuan klaim yang bertujuan mendapat pembayaran yang lebih besar dari jumlah kerugian riil dapat dikatakan sebagai riba, riba adalah pengambilan harta orang lain tanpa imbalan apapun. Sedangkan bila dilihat dari salah satu prinsip asuransi menurut Islam terdapat adanya larangan riba, maisir (judi) dan gharar (tipuan), yang ketiga hal tersebut dapat menguntungkan sebelah pihak saja dan pihak lainnya dirugikan.

Tujuan dari prinsip indemnitas ini yaitu menghindarkan tertanggung untuk mendapatkan penggantian yang lebih. Dalam prinsip indemnitas dinyatakan bahwa perusahaan asuransi hanya memberikan penggantian atas kerugian kepada tertanggung dan penggantian itu tidak melebihi kerugian riil tertanggung, hanya memulihkan keadaan ekonomi tertanggung sebelum terjadinya kerugian tersebut.

Ada dua hal penting yang terdapat di dalam prinsip subrogasi dan prinsip indemnitas, yaitu pertama bahwa adanya penggantian kerugian oleh

penanggung kepada tertanggung tidak boleh menjadi diuntungkan. Apabila dengan berasuransi seseorang menjadi diuntungkan, maka praktik itu akan membawa seseorang dengan motif judi atau taruhan. Kedua, batas tertinggi ganti rugi tersebut tidak melebihi kerugian riil tertanggung dalam asuransi kerugian. Dan jika dilihat dari segi penggantian kerugian dalam syariat Islam, jumlah ganti rugi tidak boleh kurang ataupun lebih dari jumlah kerugian yang diderita tertanggung. Dari sini nampak bahwa dengan adanya prinsip subrogasi yang dilengkapi dengan prinsip indemnitas dalam asuransi dapat sejalan oleh aturan hukum Islam.

Dengan melihat uraian di atas maka jelaslah bahwa pandangan hukum Islam terhadap Hak Subrogasi dapat diterima. Karena jika dilihat tujuan dari prinsip subrogasi dan prinsip indemnitas itu keduanya bersenyawa dan merujuk kepada salah satu prinsip asuransi menurut hukum Islam atau *Takaful*, yaitu adanya larangan *riba*, *maisir* (judi), dan larangan *gharar* (ketidakpastian). Di mana tujuan dari prinsip subrogasi dan prinsip indemnitas adalah untuk menghindari pertaruhan dan perjudian yang diakibatkan oleh tertanggung dengan meminta ganti rugi dua kali kepada pihak asuransi dan juga kepada pihak ketiga. Adanya penggantian kerugian atau pengambilan keuntungan ganda oleh tertanggung kepada pihak ketiga itu membawa seseorang kepada motif judi. Sedangkan akad judi adalah akad *gharar*, karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh mengharapkan keuntungan yang pasti. Lebih dari itu, bahwa dengan adanya judi, salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan.

Dari sini nampak bahwa keberadaan prinsip indemnitas yang melengkapi prinsip subrogasi dalam asuransi sebagai penghalang adanya motif orang melakukan judi dalam berasuransi. Sedangkan, judi itu sendiri adalah praktek yang dilarang oleh Islam. Oleh karenanya, prinsip subrogasi dapat diterima menurut hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan setelah dianalisa maka pada bab ini ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak subrogasi dalam perjanjian asuransi kendaraan di PT.

Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung belum berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tidak berjalannya hak subrogasi di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHD, karena disebabkan faktor Internal dan faktor Eksternal.

2. Menurut hukum Islam hak subrogasi dapat diterima/ tidak menyalahi.

Karena prinsip subrogasi pada asuransi konvensional tidak dapat terpisahkan dengan prinsip indemnitas, di mana tujuan keduanya menghindari pertaruhan dan perjudian yang dilakukan bertanggung dengan menagih dua kali yakni kepada pihak asuransi dan juga kepada pihak ketiga. Hal tersebut sama dengan prinsip menghindari *riba*, *maisir* (judi), dan larangan *gharar* (ketidakpastian) pada asuransi syariah (*Takaful*).

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak tertanggung agar dapat menjelaskan dengan benar tentang suatu peristiwa yang terjadi sehingga memudahkan pihak asuransi dalam memenuhi klaim yang diajukan dan tidak merugikan penanggung dalam hal pelaksanaan klaim subrogasi.
2. Disarankan kepada pihak penanggung dalam hal ini PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Lampung agar lebih cermat dalam menganalisis calon tertanggung/ nasabah dan berupaya memberikan pemahaman terhadap adanya klaim subrogasi kepada tertanggung guna menghindari terjadinya itikad tidak baik dari tertanggung yang mengajukan klaim akibat peristiwa yang melibatkan pihak ketiga.
3. Disarankan kepada pengambil kebijakan agar dapat menerbitkan kebijakan yang jelas dan sanksi hukum yang tegas terhadap tindakan para pihak dalam pelaksanaan prinsip subrogasi pada perjanjian asuransi kendaraan sehingga tidak lagi terjadi tindakan yang merugikan para pihak dalam perjanjian asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 7, (Indonesia: MaktabahDahlan, 2010)
- Abu ‘Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Dar Al-Fikr, Juz 7, (Bairut: 1992)
- Abdullah Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2011)
- A. DjazulidanJanwari, Yadi, *Lembaga-LembagaPerkonomianUmat*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002)
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1990)
- Ali, AM Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Ali, Zainuddin, *HukumAsuransi Syari’ah*, Cet. Pertama, (Jakarta: SinarGrafika, 2008)
- *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Anwar, Syamsul, *HukumPerjanjian Syari’ah*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007)
- Asikin, Zainal, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Radin Intan Lampung, 2014)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam*,(Nomor 2/ VII/ 1996)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-karim Dan Terjemahnya*,(Bandung: Diponegoro 2001)
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, EdisiRevisi Cet. Ketiga,(Jakarta:2006)
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: SinarGrafika, 2012)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Universitas Psikologi UGM, 1987)
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Ahli Bahasa Oleh Zainuddin, Widjaya, (Jakarta: 1992)
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- Karim, Adiwarman A dan Oni Sahroni, *Riba, Gharardan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet. Pertama, (Jakarta: UII PersAnggota IKAPI, 2000)
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Muslehuddin, Mohammad, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/ PMK 010/ 2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi
- Salim, Abas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Saharuddin, Desmadi, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits*, (Bandung: Sinar Baru, 1993)
- Silalahi, Ferdinand, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- Subektidan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2013)
- Sudjana, Nana, *Prosedur Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1991)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005)
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Cetke I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah*, Cetke II, (Jakarta: Masagung, 1989)

JURNAL:

Kuat Ismanto, Prinsip-prinsip Hukum Asuransi dalam Kajian Hukum Islam,
dalam jurnal www.kuatismanto.com, 25 FEB 2017: -16

WEBSITE:

Rusman, “PrinsipSubrogasi”, (On-line), tersedia di :
www.akademiasuransi.org/2012/09/prinsip.subrogasi_18.html
(18 September 2012)